

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

BAPELITBANGDA merupakan unsur pendukung Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu pimpinan Balai Kota dalam menetapkan strategi di bidang penataan perbaikan di daerah serta evaluasi dan pelaksanaannya. Dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan daerah dalam melakukan peningkatan pembangunan khususnya di Bidang Pemerintahan, Badan Pengembangan Pembangunan Daerah dibentuk sebagai jawaban terhadap kebutuhan, kemajuan, dan pengembangan di Bidang Pembangunan beserta kemajuan teknologi terkini.

Ini telah memberikan pemerintahan daerah kewenangan dan kebebasan. sepenuhnya menyusun serta menentukan program dan kebijakan daerah diselaraskan dengan UUD Nomor 32 Tahun 2004. Dengan adanya kemandirian provinsi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih otonom, sehingga menjadi pionir pembenahan wilayah yang berbeda. Menuju dengan tujuan dan pencapaian akan terjadi rencana terpenting yang harus dipersiapkan oleh badan legislatif teritorial. Perlu mencapai tujuan dan kemajuan ini, perencanaan digukan untuk menentukan langkah dan meneliti tujuan yang tepat. Agar mencapai target dan tujuan tersebut. (Tarigan, 2004).

Pembangunan dan perencanaan daerah merupakan bagian penting dari kerangka perencanaan pembangunan daerah. Komponen penyusunan kemajuan sangat penting dalam hal Perencana penyusunan Kerja Pemerintah Daerah. Maksud dalam penyusunan kemajuan adalah agar kegiatan perbaikan tersebut sesuai dengan alur yang diharapkan untuk tidak bersifat samar-samar. Ketiadaan pengaturan kemajuan adalah agar perbaikan yang ingin diselesaikan tertata rapi dan teratur, sehingga pengendalian pelaksanaannya mudah.

Selanjutnya, Badan Kerja Inovatif Penyiapan Wilayah (BAPELIBANGDA) sebagai landasan untuk melengkapi tugas yang pokok dan kemampuannya bagaimana rencana dalam Peraturan Nomor. 25, Tahun 2004 tentang Sistyem Pembangunan dan Perencanaan Daerah (SPPN) bertugas menyiapkan tujuan, menyusun rencana, mengendalikan perencanaan, dan menilai pelaksana dan pengembangan di setiap tingkat wilayah.

Perencaan perbaikan di setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sekaligus mengurangi inkonsistensi perbaikan antar bidang. Meski begitu, pelaksanaannya sulit, banyak kendala, mengingat tidak adanya konsistensi dalam penyusunan, materi, dan

permasalahan di lapangan. Selain itu, sangat sedikit ruang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengatur pembangunan sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Selain permasalahan-permasalahan di atas, setiap daerah tentunya mempunyai permasalahan sendiri yang berkali-kali berbeda diantar daerah. Perbedaan itu pula yang menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam menyusun perencanaan yang akan segera dilakukan pada ruang yang berkaitan. Oleh sebab itu, persoalan-persoalan yang muncul di daerah harus dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagaimanapun juga, sebagai aturan umum, isu-isu lokal sering kali tidak tercermin dalam struktur pengaturan otoritas publik.

Perbaikan penyusunan komponen-komponen dan penetapan kebutuhan merupakan hal yang sangat mendasar didalam hal menyusun Rencana Kerja Pemerintah Provinsi. Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Wilayah akan dapat dijadikan catatan penyusunan tahunan, Daerah perlu menyelenggarakan musyawarah Renungan Penyusunan Perbaikan (Musrenbang) secara bertahap diawali dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/kota sampai dengan tingkat kota/kabupaten. tingkat umum, termasuk menyelenggarakan Silaturahmi kelompok Kerja Perangkat Daerah/Umum, Rezim dan Kota (Silaturahmi SKPD). Segala informasi yang di dapatkan dari Musrenbang secara bertahap dikerjakan karena akan berdampak pada kegiatan pengembangan yang terkait dengan pemberian subsidi dan rencana fasilitas kegiatan di daerah.

Kualitas dasar dari perencanaan umum mencakup serangkaian kegiatan berturut-turut yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah di masa yang akan datang dan semua pengembangan merangkul siklus berturut-turut yang akan dianggap sebagai gagasan dalam berbagai tahap. Karena langkah-langkahnya dilakukan dalam urutan tertentu, maka ada tahapan dalam perencanaan, seperti: Bedakan masalahnya, Perincian tujuan umum dan fokus eksplisit terhadap sasaran kuantitatif, Proyeksi keadaan di masa depan dan Pencairan dan evaluasi berbagai pilihan rencana Penyusunan.

Absensi pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) menggunakan media kertas sehingga terjadi sering kehilangan proses pencatatan banyak kesalahan juga tidak efektif dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pembimbing lapang yaitu bu Eni sebagai kepala bidang perencanaan penelitian dan pengembangan daerah dibutuhkan rancangan aplikasi website dalam membantu pengolahan data absensi. Karena dibutuhkannya absensi dalam bentuk website agar mudahnya pengumpulan atau pengelolaan data anggota dan dengan waktu yang terjangkau dalam mengolah

data, maka dibuat penelitian dengan judul **“Implementasi absensi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah(BAPELITBANGDA) berbasis website”** dengan harapan agar absensi dapat terorganisasi dengan baik.